

KUASA SIMBOLIK PATUNG RUANG PUBLIK : STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

Muhammad Hendra Himawan
Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta
m.hendrahimawan@gmail.com

ABSTRACT

This article is the result of research examining how the development of public art, definitive public space sculpture and conventions that surround it, to see the extent to which the political dimension sees how to make the existence of public sculpture as a tool of legitimacy of power, development of image and power and contact with social discourse that develops in society.

From the qualitative method of the Slamet Riyadi Statue on Jalan Slamet Riyadi, the Major Achmadi Statue in the Banjarsari Lima Proximity (Proliman), 45 Banjarsari Monument Statue (Serangan 4 Hari Monument in Surakarta) is located in Banjarsari Park, and the Statue Soekarno at Manahan Sports Complex, Surakarta, found that the existence of the statue was a proof of how the symbolic system was carried out to legitimize power by government authorities.

Various forms of work that illustrate the dominance of militaristic icons compared to civilian icons, which shows how the quo vadis of military-civil relations are explicit and implied. Furthermore, this research found evidence that so far there have been a lot of public space sculptural works that do not idolize the public's need for living space.

Symbolic power practices are continuously echoed through a system of visual language and symbolization that shows how power sneaks under the conscious space of society. The community is not aware of how the power system stands and hides behind these sculptures of public space, whatever the reason for their establishment; inheritance of nationalism, development of moral values, even ideology.

Keywords: history, public space sculpture, symbolic of power, Surakarta City

ABSTRAK

Artikel ini hasil penelitian yang mengkaji bagaimana perkembangan seni publik, seni patung ruang publik secara definitif maupun konvensi-konvensi yang melingkupinya, hingga melihat sejauh mana dimensi politis melihat bagaimana menjadikan keberadaan patung-patung publik sebagai alat legitimasi kekuasaan, pembangunan citra dan kuasa serta singgungan dengan wacana sosial yang berkembang di masyarakat.

Dari penelitian dengan metode kualitatif yang telah dilakukan pada Patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, Patung Mayor Achmadi di Kawasan Simpang Lima (Proliman) Banjarsari, Patung Monumen 45 Banjarsari (Monumen Serangan 4 Hari di Surakarta) yang terletak di bilangan Taman Banjarsari, serta Patung Soekarno di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta, didapat bahwa keberadaan patung tersebut menjadi bukti bagaimana sistem simbolik dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan oleh otoritas pemerintah.

Ragam bentuk karya yang menggambarkan dominasi ikon militeristik dibandingkan ikon sipil, yang menunjukkan bagaimana quo vadis hubungan militer- sipil tersurat dan tersirat. Lebih jauh lagi penelitian ini menemu bukti bahwa sejauh ini banyak sekali pembangunan karya seni patung ruang publik yang tidak mengidahkan kebutuhan publik atas ruang hidupnya.

Praktik kuasa simbolik yang didengungkan secara terus-menerus melalui sistem bahasa visual dan simbolisasi yang menunjukkan bagaimana kekuasaan menyelinap dibawah ruang sadar masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bagaimana sistem kekuasaan berdiri dan bersembunyi dibalik karya-karya patung ruang publik ini, apapun dalih pendiriannya; pewarisan nasionalisme, pembangunan nilai moral, bahkan ideologisasi.

Kata kunci : sejarah, seni patung ruang publik, kuasa simbolik, Kota Surakarta

PENDAHULUAN

Selain keberadaannya sebagai media ungkap ekspresi personal para seniman, seni patung juga berkembang sebagai bagian dari wajah sebuah kawasan. Patung ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai penanda visual sebuah wilayah secara geografis namun juga secara kultural. Dengan alasan itulah maka sebagian besar patung yang berada di wilayah kota tertentu akan dibuat sesuai ciri khas wilayah tersebut (baik dari segi kultur, sosial, politik, ataupun ekonomi). Dalam sejarahnya, pembangunan monumen dan tugu peringatan di Indonesia sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Penciptaan patung ruang publik yang menghiasi kawasan ataupun wilayah kota menjadi salah satu penanda atau landmark untuk media informatif dan dokumentatif kesejarahan. Kita bisa melihat pada karya patung monumen seperti patung almarhum Jendral Sudirman di depan gedung DPRD Yogyakarta dan patung Dr. Sam Ratulangi oleh Hendra Gunawan. Patung - patung besar karya seniman Edhi Soenarso pun menjadi catatan penting bagaimana seni patung menjadi bagian dari politik kebudayaan Negara di era Soekarno.

Seni patung publik sekaligus

mengusung kepentingan ganda di luar fungsi fisiknya, sebagai penanda sudut kawasan atau landmark, yakni sebagai sarana cermin masyarakatnya yang merefleksikan nilai sosial budaya, serta sebagai sarana pewarisan (transform) nilai tertentu yang dianggap penting, dari kelompok dan generasi yang satu kepada kelompok dan generasi lainnya (sebagai media pembangun aspek spiritualitas warganya). Patung landmark, merupakan ekspresi jati-diri suatu kawasan yang disebut sebagai faktor kunci dalam penciptaan rasa harga diri dan jati-diri atau identitas, dan pengejawantahan dari kesinambungan masa lampau, masa kini dan masa mendatang.

Karya patung landmark diwujudkan secara kongkrit (*visualized*) melalui suatu upaya rekayasa simbolis agar dapat tercipta dialog atau komunikasi dengan khalayak luas atau publik. Sebagai sebuah karya seni rupa khalayak (*public art*), patung landmark dibuat berdasarkan sejumlah prasyarat, kaidah serta prinsip-prinsip yang mendasari, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dibangunnya sebuah patung publik.

Keberadaan patung ruang publik sebagai landmark di kawasan kota Surakarta sangatlah massif.

Sebutlah seperti patung Slamet Riyadi yang menjadi penanda jalan utama kota, patung Monumen Mayor Achmadi di Simpang Lima Banjarsari, Monumen 45 di Taman Banjarsari, serta patung IR Soekarno Membaca di Gelora Manahan. Praktik legitimasi kekuasaan pun tidak bisa dilepaskan dari keberadaan patung ruang publik tersebut. Tidak berbeda dengan gagasan kolonial yang rajin melegitimasi ruang jajannya dengan memberi nama, pendirian patung ruang publik merupakan bentuk legitimasi kekuasaan negara atas kawasan administratifnya, baik yang berada di dalam maupun di kawasan perbatasan kota.

Perubahan tipologi bangunan dan morfologi kota dapat dianggap sebagai suatu cerminan bagaimana sejarah oleh perubahan kekuasaan oleh kelompok berkuasa pada waktu itu. Tak luput juga dengan keberadaan patung ruang publiknya, hal ini disebabkan karena keberadaan patung ruang publik dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik akan wajah sebuah kota. Maka, tak mengherankan ketika ruang publik ini kemudian menjadi ruang pertarungan bagi banyak pihak. Sebagai contoh, ketika sebuah partai pengusung kepala pe-

merintahan terpilih menang, maka banyak patung tokoh panutan dari partai tersebut akan dibuat dan ditempatkan di ruang-ruang strategis kota.

Maka kemudian permasalahan yang muncul adalah, apa pentingnya patung dengan simbol tokoh tertentu yang sebetulnya tidak memainkan peran penting di kota tersebut? Kenapa tidak membuat patung yang langsung terhubung dengan simbol kultural kota tersebut? Pertanyaan lanjutan yang kemudian muncul sekaligus menjadi jangkar dari penelitian ini adalah: Sejauh mana kuasa simbolik patung ruang publik dalam membentuk persepsi terhadap wajah sebuah kota?

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Redstone, Louis G. et al *Public Art, New Direction*. (1981), secara khusus menulis tentang *public art*, yang di dalamnya termasuk monumen. Monumen erat hubungannya dengan landmark karena ditunjang oleh sejumlah elemen yang mampu memberi ciri menonjol melalui seni bangun arsitekturalnya. Secara kongkrit bangunan monumen pada suatu lokasi tertentu memberikan ciri visual sudut kota tertentu, sehingga memberikan orientasi arah bagian suatu

kota. Monumen sekaligus mengu-
sung kepentingan ganda di luar fung-
si fisiknya (sebagai penanda sudut
kota atau landmark), yakni dalam fu-
ngsi sosialnya sebagai sarana cermin
masyarakat yang merefleksikan nilai
sosial budaya, serta sebagai sarana
pewarisan (transform) nilai dari ke-
lompok dan generasi yang satu ke-
pada kelompok dan generasi lainnya
sebagai media pembangun aspek spi-
-ritualitas warganya. Monumen seba-
gai salah satu bentuk bangunan ar-
sitektur, merupakan ekspresi jatidiri
suatu kota yang disebut sebagai fak-
tor kunci dalam penciptaan rasa har-
ga diri dan jatidiri atau identitas, se-
bagai pengejawantahan dari kesinam-
-bungan masa lampau, masa kini dan
masa mendatang (Sidharta, 1986).

Olwyn Montgomery dalam *'Do
the public like it?'* (Montgomery 20
00) berusaha mendudukan seni
kontemporer di ruang publik dengan
kedekatannya terhadap publik di-
mana karya tersebut berada. Pan-
dangannya didasarkan pada penda-
pat Mark Miles bahwa karya seni ti-
dak lantas menjadi sebuah karya
seni publik ketika ditempatkan di
ruang publik, apalagi ketika publik
tidak bisa memiliki akses terhadap
makna karya tersebut. Hal ini men-
jadi lebih sulit mengingat bahwa
konsep publik tidak dapat dilihat

secara lingkup geografis saja, na-
mun juga harus dilihat dari sisi
psikologis dan budaya (Miles 1997,
27). Tulisan ini juga penting karena
mempertanyakan posisi seni publik,
siapa yang menginginkannya, siapa
yang memutuskan bentuk seperti
apa yang akan ditampilkan. Kese-
muanya akan berujung pada kepen-
tingan kekuasaan dan permasalah-
an siapa yang berkuasa pada saat
itu. Tak kalah pentingnya adalah
unsur 'kebermanfaatan' moral yang
harus diperlihatkan oleh sebuah pa-
tung di ruang publik. Oleh karena-
nya, jamak dilihat patung-patung
yang memperlihatkan sosok pahl-
awan atau objek lain yang memper-
lihatkan 'ketinggian' nilai moral sua-
tu masyarakat, walau objek tersebut
jauh dari nilai estetis. Sisi perta-
rungan ekonomis juga diperlihatkan
dari bagaimana di beberapa wila-
yah, pembuatan/ pembangunan pa-
tung publik dibiayai oleh perusaha-
an tertentu dengan mengangkat te-
ma kearifan lokal masyarakat se-
tempat, yang sebenarnya tidak lebih
dari upaya untuk meminimalisir kon-
flik dengan berlandung di balik 'per-
tanggungjawaban' moral atas peng-
gunaan sumber daya ekonomi.

Werner Fenz dan Maria-Re-
gina Kecht dalam tulisan mereka
mengenai *'The Monument is Invisi-*

ble, the Sign Visible' pada tahun 1989 menjelaskan seni yang ada di ruang publik harus berkaitan dengan ruang tersebut. Atau dengan kata lain, sebuah karya seni di ruang publik baru bisa disebut sebagai seni ruang publik ketika memiliki konteks terkait masyarakat setempat, bisa berupa sejarah, kondisi geografis, atau kultur masyarakat (Fenz dan Kecht 1989, 77). Hilde Hein menjelaskan di dalam *'What is Public Art?: Time, Place, and Meaning'* tentang beberapa hal terkait seni ruang publik. Pertama, seni ruang publik adalah *oxymoron* dalam pandangan seni modern dan teori estetika seni. Di satu sisi, estetika filosofi modern berfokus pada pengalaman subjektif dan komodifikasi karya seni. Oleh karenanya, seni menjadi produk yang sangat personal dari seniman, yang hanya bisa dihargai melalui pengalaman dan kontemplasi personal dari penikmatnya. Di sisi lain, sebagai sebuah karya publik, seni harus menghilangkan subjektivitas seniman dan memberikan ruang lebih kepada masyarakat yang (Hein 1996, 1). Kedua, upaya mendekatkan seni ke publik tidak pernah bisa dilepaskan dari kepentingan politik dari penguasa pada masyarakat dan waktu tertentu (Hein 1996, 3). Ketiga, pe-

nempatan karya seni dan aksesibilitas seringkali menjadi parameter yang disalahartikan dalam seni ruang publik di kota. Patung-patung yang ditempatkan di halaman rumah sakit, universitas, atau pusat perbelanjaan tidak serta merta bisa disebut sebagai karya seni ruang publik. Keempat, kebijakan pembuatan karya seni di ruang publik tidak bisa lepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Kita bisa melihatnya dari bagaimana kebijakan pengurangan pajak dari pemerintah bagi perusahaan yang memberikan kontribusi kultural terhadap kota, misalnya dengan membangun patung atau karya seni di ruang publik (Hein 1996, 4).

Dari beberapa kajian dan sumber literature ini secara tegas didapatkan bahwa, seni patung ruang publik maupun monument, mempunyai kaitan erat dengan struktur sosial-politik dan secara simbolik menjadi instrument 'legitimasi kekuasaan' atas otoritas penguasa. Untuk melengkapi kajian digunakan pendekatan teori simbolik Pierre Bourdieu.

Salah satu aspek kekuasaan yang lazim dipraktikkan adalah melalui dominasi dan proses manipulasi, dari cara yang paling kasar sampai halus sekalipun.

Instrument yang sering luput untuk dilihat sebagai media penyebaran kekuasaan adalah seni. Penelitian ini akan melihat bagaimana seni di ruang publik, khususnya patung, memiliki kuasa simbolik yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan tertentu. Teori kuasa simbolik dari Bourdieu pada awalnya digunakan untuk melihat bagaimana bahasa menjadi instrument penyebaran kekuasaan yang akan memihak pihak tertentu dan melemahkan lainnya. Pandangan tersebut akan dioperasikan dalam kerangka pemikiran bahwa seni juga dapat digunakan sebagai sebuah instrumen kekuasaan, terutama kaitannya dengan keberadaan seni patung di ruang publik.

Catatan penting dari pandangan Bourdieu mengenai kuasa simbolik ini adalah bagaimana hal tersebut sering kali tidak diketahui oleh masyarakat karena beroperasi secara diam-diam/ terselubung. Seperti yang diungkapkan olehnya:

“Symbolic power – as a power of constituting the given through utterances, of making people see and believe, of confirming or transforming the vision of the world and, thereby, action on the world and thus the world itself, an almost magical power which enables one to obtain the equivalent of what is obtained through force (whether physical or economic), by virtue of the

specific effect of mobilization – is power that can be exercised only if it is recognized, that is, mis-recognized as arbitrary” (Bourdieu 1991, 170).

Dari penjelasan tersebut, kita lihat bagaimana kuasa simbolik adalah bentuk kekuasaan untuk membentuk hal-hal tertentu lewat ujaran, membuat orang percaya, untuk memperkuat atau mengubah cara pandang terhadap dunia, sebuah kekuasaan yang (nyaris) magis yang memungkinkan seseorang mendapat hasil yang sama dengan yang diperoleh lewat paksaan. Dan yang terpenting, kuasa simbolik hanya bisa dijalankan ketika ia tidak langsung dikenali keberadaannya.

Dengan merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, argumen utama penelitian ini adalah, patung di ruang publik di wilayah kota Surakarta merupakan bagian dari kuasa simbolik, sebagai sebuah mekanisme penggunaan kekuasaan yang dijalankan secara terus-menerus dan tersembunyi, yang beroperasi di alam bawah sadar masyarakat sehingga mereka menganggapnya sebagai satu hal yang terberi (taken for granted).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber

kepustakaan lain. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran utuh dan jelas tentang perkembangan seni patung ruang publik, sistem simbol dan kuasa simbolik yang melekat di dalamnya dengan studi kasus pada karya-karya patung ruang publik di wilayah kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (*inferensi*) yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan menganalisis seluruh pembahasan mengenai: pertama, sejarah perkembangan seni patung ruang publik dari awal sampai sekarang (2017). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, deduktif dan Deskriptif.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pendahuluan, kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana jejaring kuasa yang muncul pada beberapa karya patung publik

yang ada di kota Surakarta. Untuk fokus kajian, penelitian ini mengambil beberapa patung pahlawan yang telah menjadi landmark sebuah kawasan. Pilihan menggunakan patung landmark sebagai sample dikarenakan landmark sendiri merupakan bagian khusus dari kajian tentang seni rupa kontemporer di ruang publik. Meminjam pandangan dari Agus Dermawan T (2001) dalam tulisan pada pengantar katalogus Gelar Karya Sa-yembara Landmark Ancol. Jakarta, dengan judul "Tanda-tanda Tempat yang Bernama Landmark". Dia mengatakan bahwa seni bangun monumen tak bisa dilepaskan keberadaannya pada sebuah kota, sebagai bagian penting dari kelengkapan wajah kota. Ia tidak sekedar menjadi titik orientasi bagi penghuninya untuk membantu membentuk ingatan visual sebagai bagian dari struktur tata ruang kota atau landmark.

Landmark yang bisa diartikan secara bebas sebagai penanda suatu tempat/ kawasan/ lingkungan yang baik, disengaja ataupun tidak telah disepakati oleh khalayak (publik) untuk menunjuk wilayah tertentu karena terdapatnya suatu ciri yang menonjol atau dominan, sehingga mudah dikenali. Ciri menon-

jol itu bisa disebabkan oleh faktor alamiah (berupa pohon besar, batu besar di pinggir jalan, bukit, atau lainnya), bisa pula berupa buatan manusia (arsitektur). Merunut gagasan dalam pemahaman diatas, penulis melakukan kajian pada 4 (empat) patung pahlawan di ruang publik kota Surakarta diantaranya adalah; Patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, Patung Mayor Achmadi di Kawasan Simpang Lima (Proliman) Banjarsari, Patung Monumen 45 Banjarsari (Monumen Serangan 4 Hari di Surakarta) yang terletak di bilangan Taman Banjarsari, serta Patung Soekarno di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta.

Analisis Karya

Patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta

Bentuk visual patung monumen Slamet Riyadi ditinjau dari segi seni memiliki tinggi 7 meter ditambah landasannya 4 meter dengan total ketinggiannya 11 meter tidak menyalahi aturan dari pihak keraton Surakarta, karena tingginya tidak lebih dari gapura keraton. Bahan material yang terbuat dari perunggu dirasa tepat sebagai patung monumen, karena bahan tersebut awet serta tidak mudah retak dalam

menghadapi segala cuaca baik panas maupun hujan.



Gambar 1

Patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta

(Foto: Dokumentasi Penulis, Oktober 2017)

Bentuk visual monumen sudah dibuat secara 'sempurna' sesuai persyaratan pembuatan patung monumen baik dari segi proporsi, anatomi dan draperi. Ke 'sempurnaan' itu terlihat pula pada sikap berdiri mengacungkan pistol yang mempunyai makna sebagai pemimpin mengeluarkan aba-aba untuk maju melawan penjajah, dengan semangat untuk pantang menyerah dan simbol kepahlawan dari tokoh pejuang masa lalu dalam melawan penjajah yang dibuat dalam bentuk naturalis. Dari segi budaya menunjukkan bah-

wa lokasi penempatan patung monumen Slamet Riyadi sudah berdasarkan konsep tata ruang kota di kawasan.

Merunut pada gagasan tentang seni publik, karya patung Slamet Riyadi merupakan satu wujud dari monument sebagaimana pandangan Redstone, Louis G. et al. (1981) *Public Art, New Direction. United State of America: Mc Graw-Hill*. Patung ini telah menjadi sebuah landmark penting dikarenakan posisinya yang strategis berada di tapal batas jalan utama kota Surakarta. Terkait dengan kondisi infrastruktur dan perwajahan karya ini, juga ditunjang oleh elemen yang mampu memberi ciri menonjol melalui seni bangun arsitekturalnya. Secara kongkrit bangunan patung Slamet Riyadi di lokasi ini telah memberikan ciri visual sudut kota Surakarta, sehingga memberikan mampu memberikan orientasi arah bagi publik yang melewatinya.

Jalinan Kuasa

Budaya masyarakat Surakarta yang kental dengan budaya Jawa dan ikatan historisitas yang kuat, mempunyai keterikatan sejarah yang kental dengan perjuangan era kolonial. Gagasan tentang pendirian patung Slamet Riyadi, semestinya

dirancang dalam koridor pemahaman warga yang erat dengan tradisinya. Akses informasi akan sosok patung tersebut kurang didedahkan dalam informasi yang mendukung. Pemilihan Slamet Riyadi sebagai tokoh yang mesti dimonumenkan juga sangat dilematis dan erat dengan kekuasaan. 'Monumen' yang didirikan ini merupakan hibah dan sumbangan dari TNI kepada Kota Surakarta, tanpa ada pertimbangan untuk meminta saran dan mendengarkan suara publik.

Hal tegas diungkapkan dalam beragam media bahwa patung ini merupakan sumbangan dari KSAD TNI yang menjabat pada waktu itu, Djoko Santoso. Menyitir dalam media, bahwa dalam sambutannya Djoko Santoso mengatakan, di tubuh TNI ada program pembinaan tradisi dan sejarah berupa penghormatan dan penghargaan kepada prajurit yang melaksanakan tugas dengan baik. Langkah - langkah yang telah dilakukan diantaranya dengan membangun monumen-monumen bersejarah seperti Monumen Jenderal Soedirman di Ambarawa dan Monumen Brigjen Slamet Riyadi di Solo tersebut. Diharapkan pembangunan monumen itu juga dapat diambil manfaatnya oleh rakyat.

Meski upaya ini dimaksudkan

agar memberikan manfaat bagi publik, sebagaimana gagasan militer untuk membangun fasilitas lapangan militer karena semakin sempitnya ruang publik, sejatinya hal ini merupakan satu bentuk legitimasi kekuasaan militer dalam ranah sipil. Terlepas dari sisi kebermanfaatannya, pembangunan karya patung pahlawan di ruang publik, semestinya mengidahkan gagasan dan kebutuhan publik akan interaksi ruang yang nyaman. Keberadaan patung ini menyiratkan institusi militer sebagai pihak yang menginginkan, memutuskan bentuk seperti apa yang ditampilkan. Isyarat legitimasi kekuasaan dimunculkan dalam gesture patung yang mengacungkan senjata, menonjolkan aspek maskulinitas dan paham militeristik yang keras.

Kebermanfaatan moral yang dimunculkan dalam patung ini jauh dari apa yang semestinya dihadirkan di ruang publik. Patung dengan gesture kepahlawanan ini semestinya memperlihatkan 'ketinggian' nilai moral suatu masyarakat, per se objek tersebut jauh dari nilai estetis.

Meminjam gagasan Albert Elsen dalam tulisannya, *'What We Have Learned about Modern Public*

Sculpture: Ten Propositions' (Elsen 1989), gagasan bahwa seni patung di ruang publik beririsan erat dengan bagaimana upaya mendekatkan seni ke publik tidak pernah bisa dilepaskan dari kepentingan politik dari penguasa pada masyarakat dan waktu tertentu, juga dilihat pada spirit bagaimana Pemerintah Kota Surakarta sangat getol untuk menjadikan Slamet Riyadi sebagai Pahlawan Nasional, yang tentunya hal ini berkorelasi dengan bagaimana citra dan identitas kota ini akan dibentuk. Slamet Riyadi merupakan salah satu dari pahlawan nasional yang mendapatkan Bintang Mahaputera Adiprada dari Presiden menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2006.

Kenyataan ini menunjukkan bagaimana militer (ataupun yang diwakili oleh Kepala Stafnya) mempunyai sistem kuasa tersendiri atas pemerintahan, meski dalam dalih dana hibah.

Pemilihan lokasi dalam jantung utama kota Surakarta, adalah pilihan startegis yang secara simbolik mampu melegitimasi peran militer atas kawasan dan wilayah publik. Hal yang sangat *quo vadis* ditengah kota yang kental dengan adat dan sistem demokratis masya-

rakatnya yang multikultural.

Patung Major Achmadi di Simpanglima Banjarsari Surakarta



Gambar 2

Patung Major Achmadi di Proliman Banjarsari Surakarta.
(Dokumentasi Penulis, Oktober 2017)

Monumen Mayor Achmadi salah satu patung yang berdiri di perlimaan (Prolimanbhs. Jawa), Ujung Simpang Lima Margoyudan Kelurahan Stabelan Kecamatan Banjarsari Surakarta. Monumen berbahan perunggu ini didirikan sebagai Monumen Mayor Achmadi, sebagai penghargaan bagi sang pejuang yang pernah menjadi Komandan Ex TP/TNI Detasemen II Brigade 17

Surakarta. Monumen Mayor Achmadi sendiri terdiri dari patung Mayor Achmadi setinggi 8 meter, sebuah prasasti, serta beberapa relief pada tembok di bawah patung berkisah tentang perjuangan sosok pahlawan, disertai dengan taman yang cukup luas.

Mayor Achmadi dalam patung tersebut digambarkan pada posisi berdiri tegap, berseragam, mata memandang lurus ke depan, tangan kiri memegang sebuah buku, dan tangan kanan menggenggam pistol. Sebuah emblem tersemat pada pecinya, dan pada pundaknya terdapat tanda-tanda kepangkatan. Peletakan batu pertama Monumen Mayor Achmadi dilakukan pada 27 Maret 2010, dan diresmikan pada 7 Agustus 2010 oleh Panglima TNI Jend TNI Djoko Santoso dan Walikota Surakarta Ir H Joko Widodo (Jokowi) pada masa kepemimpinannya.

Merunut pada gagasan tentang seni publik, karya Monumen Mayor Achmadi merupakan satu wujud dari monument sebagaimana pandangan Redstone, Louis G. et al. (1981) *Public Art, New Direction. United State of America: Mc Graw-Hill*. Patung ini telah menjadi sebuah landmark penting dikarenakan posisinya yang strategis berada ka-

wasan utara kota Surakarta. Terkait dengan kondisi infrastruktur dan perwajahan karya ini, juga ditunjang oleh elemen yang mampu memberi ciri menonjol melalui seni bangun arsitekturalnya, berupa taman dan perindang. Secara kongkrit bangunan monument di lokasi ini telah memberikan ciri visual sudut kota Surakarta, sehingga memberikan mampu memberikan orientasi arah bagi publik yang melewati Simpang Lima Surakarta.



Gambar 3
Relief dibawah Patung Mayor Achmadi, Surakarta.
(Dokumentasi Penulis, Oktober 2017)



Gambar 4
Prasasti dan tetenger yang berada di bawah Patung Mayor Achmadi.
(Dokumentasi Penulis, Oktober 2017)

Jalinan Kuasa

Jejaring kekuasaan yang ter- selibat dibalik pendirian monumen ini tentulah peran otoritas militer. Legitimasi kekuasaan ditunjukkan bukan hanya melalui pendirian dan peresmian patung publik, namun juga dalam serangkaian pidato yang diungkapkan Panglima TNI kepada media pada saat itu;

“Saya akan menggali nilai-nilai kepahlawanan yang ada dalam diri seorang mayor Achmadi dan mantan veteran eks Tentara Pelajar lainnya yang begitu berjasa bagi republik ini. Rasa militansi yang mereka miliki untuk saya terapkan dalam diri saya pula sebagai Panglima TNI saat ini,” ujarnya dalam pidato.

Menurutnya perlu adanya ra- sa bersatu dalam membangun ba- ngsa dan negara ini sehingga dapat sejajar dengan bangsa lain. Baik monumen Achmadi dan monumen- monumen bersejarah lainnya dapat menjadi inspirasi bagi generasi mu- da untuk selalu mewarisi dan me- neladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan.”

Gagasan untuk mendirikan se- -jumlah patung dan monumen de- ngan sosok pahlawan, merupakan satu cara yang ditempuh dalam me- nunjukkan bagaimana klaim sejarah perjuangan dikonstruksi dan dilegiti- masi oleh militer. Hal ini tentu sena- da dengan apa yang disampaikan

oleh Albert Elsen dalam tulisannya, *'What We Have Learned about Modern Public Sculpture: Ten Propositions'* (Elsen 1989), gagasan bahwa seni patung di ruang publik beririsan erat dengan bagaimana upaya mendekatkan seni ke publik tidak pernah bisa dilepaskan dari kepentingan politik dari penguasa pada masyarakat dan waktu tertentu. Kepentingan politis sangatlah nyata ditunjukkan dengan bagaimana keikutsertaan para penguasa dalam mendukung pendirian patung publik tersebut.

Monumen 45 Banjarsari (Monumen Serangan Umum 4 Hari di Kota Surakarta)



Gambar 5

Monumen 45 Banjarsari (Monumen Serangan Umum 4 Hari di Kota Surakarta)
(Dokumentasi Penulis, Oktober 2017)

Secara geografis, monument ini terletak dalam kawasan Taman Banjarsari. Sebelum melihat dari dekat bangunan fisik monument ini, ada gerbang yang dibangun menyerupai gerbang Kraton Kasunanan

Surakarta. Gerbang ini adalah pintu masuk Taman Banjarsari dimana monumen ini dibangun di tengah-tengahnya. Monumen 45 dibangun Ulama Pejuang dengan membawa keris dan Pejuang Rakyat Jelata yang membawa bambu runcing, pemandangan ini tampak dari sisi sebelah utara. Sedangkan di sisi sebelah selatan dibangun tiga patung pejuang, yaitu Prajurit, Pemu-bawa bakul (tempat nasi) dan obat-obatan.

Arsitektural bangunan Tugu Monumen 45 berbentuk atap rumah Joglo dan berketinggian 17 meter, diupayakan secara simbolis menjadi lambang hari kemerdekaan RI. Di atasnya terdapat simbol Garuda Pancasila di dalam tugu. Selain itu di sisi ini juga dibangun tangga naik dimana kita bisa melihat deretan relief yang dibuat melingkari dinding tugu. Relief-relief ini menceritakan rangkaian kejadian penting perjuangan rakyat Solo sejak perang kemerdekaan hingga Orde Baru. Di sisi sebelah selatan Monumen 45 yang juga menjadi gerbang pintu masuk Taman Banjarsari terdapat tulisan Villa Park Banjarsari. Gerbang ini diapit oleh dua tugu lilin dan sebuah gazebo di sisi barat. Monumen 45 Banjarsari ini persisnya terletak di Kelurahan Setabel-

an, Kecamatan Banjarsari. Taman ini sangat dekat dengan Pasar Legi yang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari. Ke arah barat, monumen ini juga dekat dengan Stasiun Balapan, sedangkan ke arah selatan menuju ke kawasan Mangkunegaran. Ke arah utara ke jalan menuju Terminal Tirtonadi juga terdapat Pasar Sepatu dan Sandal, Pasar Elektronik, dan juga pakaian bekas dan besi.

Sebagai sebuah landmark, Monumen ini telah memenuhi kaidah fungsinya sebagai penunjuk orientasi ruang, merunut pada gagasan tentang seni publik, karya patung Slamet Riyadi merupakan satu wujud dari monument sebagaimana pandangan Redstone, *Louis G. Et al. (1981) Public Art, New Direction. United State of America: Mc Graw-Hill*. Seni bangun monumen sekaligus mengusung kepentingan ganda di luar fungsi fisiknya (sebagai penanda sudut kota atau landmark), yakni dalam fungsi sosialnya sebagai sarana cermin masyarakat yang merefleksikan nilai sosial budaya, serta sebagai sarana pewarisan (transform) nilai tertentu yang dianggap penting, dari kelompok dan generasi yang satu kepada kelompok dan generasi lainnya se-

bagai media pembangun aspek spiritualitas warganya. Berkaitan dengan ini, keberadaan monument ini mempunyai fungsi sosial budaya, yakni sebagai momentum simbolis untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme bagi semangat juang generasi muda dalam melawan penjajah.

Jalinan Kuasa

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan sebuah karya ruang publik tidak bisa dipisahkan dari kepentingan kekuasaan, maka sesungguhnya hal demikian pula yang menjadi latar belakang dari pembacaan atas Monumen 45 Banjarsari ini. Dalam banyak ulasan media, diceritakan bagaimana sebelum masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selaku Walikota pada masa itu, Monumen 45 Banjarsari terbengkalai selama bertahun-tahun. Bahkan di sebelah barat monumen ini dulu terdapat sederet pedagang yang menjadikannya sebagai Pasar Barang Bekas dan terkenal dengan nama Pasar Klitikan.

Aktivitas ini dirasa merusak fungsi Monumen 45 Banjarsari sebagai taman kota. Akhirnya di tahun 2006, Walikota Jokowi mengembalikan fungsi Monumen 45 Banjarsari

seperti sediakala sebagai tempat rekreasi warga Solo. Para pedagang Pasar Barang Bekas di area ini direlokasikan ke daerah Semanggi dengan nama baru yaitu Pasar Klitikan Notoharjo. Jalinan kekuasaan telah mempengaruhi bagaimana keberadaan sebuah monument untuk kemudian dikelola sesuai dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan (baik itu dalam ranah kepentingan publik).

Revitalisasi yang dilakukan oleh penguasa atas keberadaan monument ini menjadi penting dilihat bagaimana, kepentingan-kepentingan kekuasaan mempunyai pengaruh atas keberadaan ruang publik. Dalam koridor pencapaian sebuah kepemimpinan, maupun kepentingan legitimasi kekuasaan. Terlebih jika dilihat bagaimana pelibatan pihak swasta dalam revitalisasi yang dilakukan, PT SRITEX melalui CSR perusahaannya. Hal ini semakin menegaskan bagaimana jalinan kuasa atas ruang publik mendapat penegasan. Sebagaimana diisyaratkan oleh Olwyn Montgomery dalam *'Do the public like it?'* (Montgomery 2000), terkait mempertanyakan posisi seni publik, siapa menginginkannya, siapa memutuskan bentuk seperti apa yang akan ditampilkan. Kesemuanya akan

berujung pada kepentingan kekuasaan dan permasalahan pada siapa yang berkuasa pada saat itu. Bahwa pelibatan perusahaan swasta dalam proyek revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk sisi pertarungan ekonomis dimana pembuatan/ pembangunan patung publik dibiayai oleh perusahaan tertentu dengan mengangkat tema kearifan lokal masyarakat setempat, yang sebenarnya tidak lebih dari upaya untuk meminimalisir konflik dengan berlandung di balik 'pertanggungjawaban' moral atas penggunaan sumber daya ekonomi.

Meski jika ditarik dalam gagasan ini, merelokasi para PKL dan revitalisasi ruang publik Taman Banjarsari, sebagai salah satu kawasan hijau layak diapresiasi, apakah kemudian masyarakat mampu memahami jejak dan sejarah dibangunnya monument ini? Sebab, semestinya revitalisasi bangunan Monumen menjadi sarana untuk membangkitkan memori kolektif masyarakat, bukan mengalihfungsikan sebagai ruang rekreasi sebagaimana yang terjadi pada Monumen ini. Nilai moral yang semestinya dibangun, bergeser menjadi arena fungsional yang lain. Hal ini tentu berjalan diluar koridor sebagaimana mestinya ruang simbolik ini menemukan fungsi utama-

nya, kesadaran dan kebermanfaat-an nilai moral, bukan nilai ekonomis maupun entertainmen.

Patung Ir. Soekarno di Gelanggang Olahraga Manahan Surakarta



Gambar 6

Patung Ir. Soekarno di Gelanggang Olahraga Manahan Surakarta.

(sumber: merahputih.com)

Karya patung publik baru hadir di Surakarta dengan objek yang telah jamak kita temui, patung Ir. Soekarno. Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa rezim kekuasaan pemerintah saat ini, banyak patung Soekarno didirikan di banyak tempat. Bukanlah sebuah kesalahan untuk mengenang jasa beliau sebagai founding father bangsa ini. Terkait dengan patung Bung Karno di Plaza Gelanggang Olahraga Manahan Surakarta ini, desain patung

proklamator ini dalam posisi duduk sambil membaca buku, mempunyai tinggi 3,5 meter dan lebar 1,5 dengan material bahan perunggu yang dikerjakan oleh Dunadi, pematung pemilik Studio Patung Satiaji Yogyakarta, yang biasa mengerjakan karya patung pesanan pemerintah Kota Surakarta (Patung Mayor Achmadi juga dikerjakan oleh beliau). Pemilihan Soekarno sebagai tokoh dalam karya patung ruang publik ini didasarkan pada keinginan Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo alias Rudy mengatakan pendirian patung Soekarno lebih pada melihat sejarah bangsa. Menurutnya, Soekarno adalah orang hebat yang selalu melahirkan gagasan. Sebagai penghormatan atas jasa Soekarno, pihaknya membangun sebuah patung Soekarno. Rudy merasa terkesan dan selalu mengingat kata-kata Soekarno, yaitu “jasmerah” (jangan sekali-kali melupakan sejarah)

Jalinan Kuasa

Membaca karya patung Soekarno Membaca ini jelaslah nampak bagaimana kekuasaan memainkan peranan penting dibalik pendirian karya patung ini. Tulisan dari Montgomery menemukan bukti dengan mempertanyakan posisi seni publik, siapa yang menginginkannya, siapa

yang memutuskan bentuk seperti apa yang akan ditampilkan. Kesemuanya akan berujung pada kepentingan kekuasaan dan permasalahan siapa yang berkuasa pada saat ini. Pemerintah melalui Walikota dengan sepihak telah memilih dan memutuskan pendirian patung publik yang nir kontekstual, dan cenderung semata melegitimasi kekuasaannya, atau lebih luas, melegitimasi gagasan dari partai yang mengusungnya.

Kita bisa mencatat, bahwa patung Bung Karno di Plasa Manahan ini merupakan patung kedua di Surakarta (eks Karesidenan Surakarta) yang mencakup satu kota dan enam kabupaten, yakni Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Boyolali, serta Sragen. Tahun 2013 Pemkab Sukoharjo membangun patung Soekarno di kawasan Solo Baru. Patung dengan posisi berdiri ini diresmikan cucu Bung Karno, Puan Maharani. Sebagaimana prosesi pendirian patung pahlawan yang erat dengan kuasa militer diranah sipil, hal senada Nampak dilakukan oleh Walikota Rudy dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dengan mendirikan patung Soekarno, tanpa pemahaman dan korelasi ruang maupun kontekstualisasi dengan

problem masyarakatnya, seolah bersembunyi dibalik misi: memasyarakatkan ajaran bijak Bung Karno pada generasi sekarang dengan membangun patung Sang Proklamator sekaligus penggali Pancasila itu.

Dasar gagasan nasionalisme dengan mengupas kembali gagasan tentang Pancasila dan dikembalikan marwahnya di jantung pemikiran publik, adalah salah satu bentuk intervensi simbolik yang kemudian menyatu dalam puluhan patung Soekarno yang didirikan. Di sini Nampak dengan tegas, bagaimana otoritas penguasa menebalkan kekuasaannya melalui sistem symbol yang dipaparkan secara lugas di masyarakat. Kepentingan-kepentingan politis nampak tercium demi legitimasi dan kepentingan ormas besar dibalik kepemimpinan para penguasa ini.

Patung Ruang Publik dan Dilema Publik

Berdasar pada kajian-kajian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, didapati kesimpulan bahwa dalam kaidah seni publik, karya Patung Slamet Riyadi di Jalan Slamet Riyadi, Patung Mayor Achmadi di Kawasan Simpang Lima (Proliman) Banjarsari, Patung Monumen 45 Banjarsari (Monumen Se

-rangan 4 Hari di Surakarta) yang terletak di bilangan Taman Banjarsari, serta Patung Soekarno di Gelanggang Olahraga Manahan, Surakarta yang menjadi objek kajian lebih didekatkan pada landmark sebuah kawasan. Hal ini dikarenakan lokasinya terletak pada titik penting yang sekaligus menjadi orientasi wilayah pada masing-masing kawasan kota Surakarta.

Kaidahnya sebagai sebuah landmark yang tidak bisa dilepaskan dari nilai fungsi sosial dan budayanya, keempat patung secara filosofis menjadi simbol pewarisan nilai bagi masyarakat. Hal yang paling dekat adalah patung-patung tersebut mengupayakan pengembalian ingatan publik atas perjuangan para pahlawan, sekaligus menjadi arena bagi pembangunan memori kolektif.

Terlepas dari persoalan bahwa konteks pembangunan patung ruang publik semestinya bersandar pada kebutuhan masyarakat akan nilai identitas dan representasi kehidupan warga hari ini, keempat patung pahlawan yang berdiri kokoh menjadi jembatan untuk memikirkan kembali apa yang paling esensial mesti dimiliki publik atas ruang hidupnya. Apakah sebuah tugu batu, ataupun nilai-nilai kehidupan yang

ditawarkan dalam serangkaian informasi atas karya-karya tersebut?

Persoalan kota adalah persoalan tentang apa yang dipresentasikan, apa yang direpresentasikan, dan bagaimana cara merepresentasikannya. Kehadiran keempat karya patung dengan tema heroisitas pahlawan menunjukkan bagaimana ikatan masyarakat kota ini dengan sejarah perang kemerdekaan, senyatanya kuat, dan secara tak sadar dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan diluar dirinya (publik misalnya). Apa yang tersirat dari epos kepahlawanan yang disimbolkan oleh keempat patung, menyiratkan dilemma publik atas kekuasaan yang tak sadar menghegemoni mereka. Kekuasaan ini tersembunyi dibalik ungkapan-ungkapan bahasa yang didengungkan berulang kali; nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai kepahlawanan. Hal senada yang diutarakan oleh Bourdieu,

“Symbolic power – as a power of constituting the given through utterances, of making people see and believe, of confirming or transforming the vision of the world and, thereby, action on the world and thus the world itself, an almost magical power which enables one to obtain the equivalent of what is obtained through force (whether physical or economic), by virtue of the specific effect of mobilization – is power that can be exercised only

if it is recognized, that is, misrecognized as arbitrary” (Bourdieu 1991, 170).

Dari penjelasan tersebut, kita lihat bagaimana kuasa simbolik adalah bentuk kekuasaan untuk membentuk hal-hal tertentu lewat ujaran, membuat orang percaya, untuk memperkuat atau mengubah cara pandang terhadap dunia, sebuah kekuasaan yang (nyaris) magis yang memungkinkan seseorang untuk mendapat hasil yang sama dengan yang diperoleh lewat paksaan. Karya-karya patung pahlawan ini menjadi sistem simbol untuk menekankan polakekuasaan ini. Melalui ujaran yang disampaikan oleh penguasa secara berulang ulang dan dikutip oleh media. Tujuannya adalah bagaimana mereka mampu melegitimasi kekuasaannya kepada publik, melalui keputusan-keputusan yang seolah baik, namun mempunyai maksud lain sebaliknya. Kuasa simbolik hanya bisa dijalankan ketika ia tidak langsung dikenali keberadaannya seperti keberadaan patungpatung publik yang ada di kota Surakarta. Tanpa memberikan akses informasi atas makna patung dan pelibatan publik di dalamnya, sesungguhnya keberadaan mereka tidak lebih dari sekedar upaya legitimasi kekuasaan dari otoritas.

Terdapat beragam bentuk dan gaya perwujudan patung bertema pahlawan di kota Surakarta. Lokasi yang dipilih secara tegas, merupakan lokasi-lokasi strategis dalam peta kawasan kota. Gaya yang diambil kebanyakan gaya naturalistik, mencerminkan keanggunan dan ketokohan yang jelas. Skala monumental juga dihadirkan untuk menambah kesan tegas dan megah. Monumen 45 Banjarsari dan Monumen Mayor Achmadi hadir dengan relief sebagai inkripsi sebagai pusat informasi, sepertinya terlampaui menojolkan visual tanpa mempertimbangkan kontekstual situs. Kedua karya patung ini merupakan perwujudan ideal monumen sebagai gaya perpaduan. Pola gaya monumen perpaduan diciptakan dengan cara menyusun beberapa bangunan dalam satu konfigurasi tunggal. Unsurnya meliputi bangunan abstrak, taman dan patung-patung figuratif, dan unsur kelengkapan lain, seperti bangunan prasasti yang diletakkan terpisah dari bangunan utama, gapura, kesemuanya diolah dirancang dalam suatu kompleks bangunan dengan lahan luas.

Kehadiran beragam gaya citra-an dan penempatan monumen, didominasi oleh tempat tersembunyi dan eksklusif, banyak dipengaruhi

oleh latar belakang situasi psikologis yang terjadi pada masa di mana peristiwa yang diperingati itu berlangsung. Sebagaimana sejarah mencatat, peristiwa kejuangan penting yang menjadi identitas dan jatidiri (eksistensi) warga atau rakyat Surakarta, terutama dalam kaitannya dengan pergolakan perang kemerdekaan, seperti peristiwa serangan umum 4 hari di Surakarta berlangsung dalam suasana kebingungan dan ketegangan di kalangan para pejuang, sehubungan dengan dikeluarkannya dua perintah siasat dari dua komandan berbeda.

Satu dari Mayor Achmadi selaku komandan SWK 106/Arjuna, 13 satu lainnya dari Letkol Slamet Riyadi, komandan Wehrkreise I. 14 Suasana ketegangan dan ketidakharmonisan komunikasi yang terjadi antara kelompok pasukan TP di satu pihak dan kelompok pasukan TNI di pihak lain, menyelimuti suasana batin kedua kelompok pasukan bukan saja pada masa pertempuran, bahkan hingga ke masa pembangunan Monumen 45 Banjarsari yang berlangsung antara tahun 1974 hingga 1986, pun juga pembangunan Monumen Mayor Achmadi di Simpang Lima Banjarsari Surakarta.

Quo vadis militer - sipil

Munculnya beragam bentuk perwujudan dan penyajian monumen para pahlawan di Surakarta, pada satu sisi mencoba menampilkan kebersamaan peran kejuangan antara sipil-militer. Akan tetapi, sebagaimana tampak dalam perwujudan estetisnya, penggunaan dan penempatan ikonografi pejuang lebih didominasi oleh peran ketokohan militer. Melalui cara ini telah nampak bagaimana legitimasi peran dimunculkan. Mitos kebersamaan yang dimunculkan masa Orde Baru melalui kemanunggalan militer dan sipil, sebenarnya dalam realitas simbolis pada monumen-monumen ini terjadi diskrepansi peran kejuangan. Patung-patung militer jauh lebih dominan daripada patung tokoh sipil.

Hal ini nampak jelas pada Monumen 45 Banjarsari. Di bangunan Monumen ini, personifikasi tokoh-tokoh yang ditampilkan berupa Kyai, dan rakyat, juga figure/ sosok perawat dan pemuda, cenderung lebih bersifat politis. Dengan kata lain, seni bangun monumen itu cenderung untuk diberi peran sebagai konstruksi simbolisasi spirit kesatuan dan persatuan, daripada sebagai konstruksi simbolis kenyataan em-

pirik yang terjadi di medan sesungguhnya. Monumen ini menunjukkan bagaimana kuasa simbolik dihadirkan secara politis, di mana tokoh-tokoh kyai dan rakyat ditampilkan, meski keduanya bukanlah sosok riil yang terlibat langsung dalam pertempuran yang sesungguhnya. Dalam kasus ini sosok-sosok patung dalam monument lebih dihadirkan dalam kepentingan pengembangan spirit kesatuan (sebagai representasi ragam keterwakilan rakyat). Kenyataan yang timpang jika melihat fakta bahwa perjuangan jauh lebih banyak mengorbankan rakyat kecil tanpa status ketokohan tertentu, terlebih pihak otoritas militer.

Solidaritas kesatuan ini juga dimunculkan pada cara penempatan monument. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam patung Slamet Riyadi dan Soekarno Membaca, keduanya menunjukkan adanya disparitas solidaritas kesatuan, antara warga, militer, maupun ormas politik penguasa. Hal itu tampak pada cara penokohan dan sekaligus penempatan monumen yang cenderung memilih lokasi-lokasi eksklusif pada wilayah publik, tanpa melakukan uji dengar ataupun melihat pada kebutuhan publik atas ruang hidup mereka. Praktik yang dilakukan merupakan satu bentuk upaya legiti-

masi simbolik atas kekuasaan mereka di ranah publik.

SIMPULAN

Monumen maupun patung di ruang publik, merupakan wujud ekspresi simbolis yang dalam peran fungsinya mengalami pergeseran sebagai medium untuk menancapkan ideology tertentu secara visual. Keberadaan sebuah objek patung sangatlah tendensius, sejauh ia dilakukan atas kepentingan publik. Sementara yang terjadi adalah upaya-upaya peneguhan kekuasaan personal maupun kelompok (korps, ormas, atau organisasi politik tertentu) yang mengatasmakan kepentingan publik. Beragam perwujudan seni bangun monumen bertema pahlawan yang tersebar di kota Surakarta, telah menjadi simbol dan instrument ideologisasi, dalam hal ini ideologi militer.

Sebagaimana tampak dari mekanisme pencitraan melalui pilihan tokoh militer, pilihan lokasi dan penempatan senibangun monumen yang dominan pada lokasilokasi eksklusif di pusat-pusat kawasan publik. Sebaliknya perwujudan seni bangun monumen yang merupakan representasi peran kejuangan kelompok sipil (Tentara Pelajar) dominan hadir dalam perwujudan seder-

hana, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang tersembunyi, karena mengandalkan dan mendasarkan pada prioritas lokasi tempat di mana peristiwa yang diperingati pernah berlangsung. Secara tegas, temuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk monumen yang ada di kota Surakarta secara terang merefleksikan kenyataan tersembunyi ketidak harmonisan relasi sipil-militer.

Sekalipun upaya penyebaran dan pewarisan nilai luhur kepahlawanan yang ingin dimunculkan sebagai bentuk pembangunan moral masyarakat didengungkan oleh otoritas, realitas yang tampak dalam wujud rupa dan media berkata lain. Segenap simbol yang dimunculkan tak lain semata upaya mereka untuk menunjukkan seberapa luas kiprah dan domuniasi kekuasaan yang mereka miliki. Sebab, mereka yang memiliki uang, memilih dan memutuskan bagaimana bentuk patung yang akan dibangun dan dimana akan diletakkan.

Berkaitan dengan prinsip dan kaidah penciptaan seni publik, mode pencitraan monumen-monumen ini sarat dengan ikonografi militeristik disertai penempatannya pada lokasi eksklusif, pada kenyataannya justru menciptakan kesenjangan

sosial antara khalayak dengan personifikasi yang direpresentasikan. Pada ranah makro, moda pencitraan simbolisme kejuangan merefleksikan bentuk otoritas pemaknaan nilai kejuangan yang secara hegemonis didominasi oleh militer, yang sekaligus menempatkan peran sipil dalam posisi subordinan. Kuasa simbolik menemukan praksisnya dalam empat patung pahlawan di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Wicaksono dan Bambang Budjono. 2012. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai, Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai (SRI). Jakarta : Dewan Kesenian Jakarta.

Blau, Peter M. 1963. "Critical remarks on Weber's theory of authority." Washington : American Political Science Review.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. 1 ed. Cambridge: Polity Press.

Budiarjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Miles, Mark. 1997. Art, Space and the City -public art and urban futures. London&New York: Routledge.

Claire Holt. 2000. Art In Indonesia:

Continuity and Change. Versi Indonesianya ditulis oleh: Sudarsono, Bandung: MSPI.

Kasiyanto, 2005, Analisis Wacana dan teoritis Penafsiran Teks, dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, ed. Burhan Bungin .Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kusnadi,dkk. 1978. Seni Rupa Indonesia dan Pembinaannya. Jakarta: Proyek Pembinaan Kesenian Departemen P dan K.

Muhadjir, Noeng, 2007, Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, edisi v. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Moeliono, Anton M. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Moyer, Glenn Harper dan Twylene. 2007. Conversations on Sculpture. Washington: Hamilton International Sculpture Center.

Nazir, Moh., 2005, Metode Penelitian, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Read, Hebert. 1964. A Concise History of Modern Sculpture, New York: Frederick A. Praeger, Publishers.

Susanto. Mikke. 2003. Membongkar Seni rupa. Yogyakarta : Jendela.

Soemardjo, Jakob.2009. Asal-Usul Seni Rupa Modern Indonesia. Bandung : Penerbit Kelir.

Sp., Soedarso. 1990. Tinjauan Seni Sebuah Pengantar Untuk Apresiasi Seni. Yogyakarta: Saku Dayar

Sana.

Sp., Soedarso. 2000 Sejarah Perkembangan Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta : CV. Studio Delapan Puluh Enterprise dan Badan Penerbit ISI Yogyakarta

_____., But Muchtar, Jim Supangkat, G. Sidharta Soegijo & Kasman KS. 1992, Seni Patung Indonesia, Yogyakarta : BP ISI Yogyakarta.

Yuliman, Sanento. 2001. Dua Seni Rupa :,Sepilihan Tulisan. Bandung: Penerbit Kalam.

Jurnal

Budiani. 1963. Arah Menuju Seni Pahat Kita, Jurnal Budaya bulan maret/april/mei 1963. No 3/4/5 th ke XII.

Muchtar, But. 1985, "Seni Patung dalam Kaitannya dengan Kehidupan Manusia", Pidato pengukuha jabatan guru besar tetap pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Istitut Teknologi Bandung, Sidang Terbuka Senat Institut Teknologi Bandung 19 Oktober 1985.

Sumarwahyudi. 1996. Seni Monumen Indonesia dari Masa ke Masa. Jurnal Bahasa dan Seni Tahun 24. No.2 Agustus 1996.

Wienarno, Eko Budi. 2003. Seni Patung Indonesia: Perkembangan Dan Kesenambungan Proses Kreatif Penciptaan Patung Di Indonesia. Jurnal BAHASA DAN SENI, Tahun 31, Nomor 2, Agustus 2003.

Blau, Peter M. 1963. "Critical remarks on Weber's theory of authority." *American Political Science Review* 57 (2): 305–16.

dra-gunawan-patung-jend-sudirman.html.
(Akses 22 Maret 2016).

Bourdieu, Pierre. 1989. "Social Space and Symbolic Power." *Sociological Theory* 7 (1): 14–25..

Elsen, Albert. 1989. "What We Have Learned about Modern Public Sculpture: Ten Propositions." *Art Journal, Critical Issues in Public Art*, 48 (4): 291–97.

Fenz, Werner, dan Maria-Regina Kecht. 1989. "The Monument Is Invisible, the Sign Visible." *October* 48: 75–78.

Hein, Hilde. 1996. "What Is Public Art?: Time, Place, and Meaning." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 54 (1): 1–7.

Montgomery, Olwyn. 2000. "Do the 'Public' Like It?" *Fortnight*, no. 385: 22–23.

Internet

<http://arsip.galerinasional.or.id/documentations/9192/detail>.
(Akses 22 Maret 2016)

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2811/Sidharta-Soegijo-G>. (Akses 22 Maret 2016).

<http://blogsenvirupa.blogspot.co.id/2013/05/biografi-edhisunarso-dan-karya.html>. (Akses 22 Maret 2016).

<http://sagidigajinta.blogspot.co.id/2010/06/hen>